

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Dikbud Hambat WTP
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Radar Bandung/Hal.4
Edisi	: Selasa, 24 Oktober 2017

Dana Dikbud Hambat WTP

SUBANG-Pengelolaan dana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Subang berpotensi menghambat opini BPK wajar tanpa pengecualiaan (WTP) Pemkab Subang.

Pada 2016 lalu, Pemkab Subang yang dua tahun berturut-turut mendapat opini disliamer, berhasil keluar untuk ketiga kalinya dan mendapat opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualiaan. Padahal, hasil penilaian penggunaan APBD 2017 itu Pemkab Subang bisa mem-

peroleh WTP jika tidak terhambat enam poin, yang lima diantaranya ada di Dinas Dikbud.

"Waktu itu terhalang lima poin, dan empat diantaranya ada Dinas Dikbud, diantaranya tata usaha BOS," kata Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Dikbud Tita Terista

Jika, keempat masalah itu tidak secepatnya dibenahi, kata Tita, laporan keuangan Pemkab Subang 2017 ini bisa gagal mendapat WTP. Ditam-

bah, penggunaan anggaran tahun berjalan ini penyerapan dananya baru 20 persen. Kepala Dinas Disdik Suwarna Murdais mengaku, total anggaran untuk belanja langsung Rp 110 miliar.

Dana sebesar itu, tertinggi berada untuk belanja raport SD dan SMP sebesar Rp 2 miliar dan 211 paket senilai Rp 60 miliar. "Untuk paket baru, empat paket yang sudah aman. Sementara lainnya, masih baru progres termasuk untuk belanja rapor,"

imbuhnya

Kendati demikian, Tita optimistis, penyerapan APBD di Dinas Pendidikan bisa tuntas sebelum berganti tahun. "AKhir November insya Allah sudah beres. Sekarang sedang kita benahi," imbuhnya

Kepala Dinas Dikbud Suwarna Murdais mengatakan, kendati terbilang telat, namun dia optimistis, secepatnya bisa dituntaskan. Suwarna enggan banyak memberi komentar soal itu. Sebaliknya, dia berjanji pada tahun depan

persoalan itu bisa dituntaskan.

"Sekarang terus kita benahi. Tahun 2018, sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Perlahan tapi pasti kita benahi," jelasnya

Bupati Imas Aryumningsih mewanti-wanti dua Dinas terkait penyerapan APBD. Selain Dinas Dikbud, Dinas lain yang disorot adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua Dinas yang mendominasi minimnya penyerapan APBD itu diminta segera melakukan pembenahan. (anr)